

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH COVID 19
BAGI MASYARAKAT**

(Di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Administrasi Publik



Oleh :

MARIA ANJELIKA NATA

NIM. 2016210106

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG
2020**

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH COVID 19

BAGI MASYARAKAT

(Studi Kasus Di Kota Malang)

RINGKASAN

Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kota malang dalam penanganan wabah covid 19 bagi masyarakat. Adapun metode yang digunakan yaitu metode studi literatur, dimana metode ini dilakukan sendiri oleh peneliti.dengan mengumpulkan sejumlah buku dan artikel yang berkaitan juga situs internet. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pemerintah kota malang telah membuat suatu kebijakan, strategi, penyelesaian, dan terapi untuk penanganan virus covid 19.dimana dilakukan untuk menekan atau mengatasi covid 19 dengan mengantisipasi penyebaran virus corona di kota malang. Pemerintah kota malang juga selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat kota malang tidak memiliki kekhawatiran berlebih terhadap virus yang melanda saat ini, baik dipusat maupun di kota malang.masyarakat dihimbau agar selalu mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penanganan, Wabah covid 19, Masyarakat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Virus corona adalah virus yang dapat membuat orang terserang penyakit parah dan bisa menyebabkan kematian dimana virus ini menginfeksi saluran pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID 19. Virus ini dapat menyebabkan kematian. Gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernafas. Wabah Virus Covid 19 menular sangat cepat dan menyebar hampir semua negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi wabah Virus Corona pada awal Maret 2020. Seperti apa yang disampaikan dalam berita bahwa kasus covid 19 telah menyebar cepat ke seluruh negara termasuk indonesia. (KOMPAS.COM. Jumat, 23 Oktober 2020). Dan juga diperkuat dari hasil petikan dalam berita “di Indonesia saja, kasus positif corona 19 , Kamis 26/3/2020, sudah mencapai 893 orang. (Detiknews.Com. 27 Maret 2020).

Sejak saat itu, upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran dampak wabah Covid-19 dalam berbagai sektor. Hal tersebutlah yang membuat Negara Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani wabah Virus Corona-19 dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) dengan tujuan agar tidak menyebar luas ke wilayah Indonesia. ”. (Detik News. Kamis 19 Maret 2020).

Menyebarnya Virus Covid 19 yang begitu cepat dan pesat hampir menyebar diseluruh wilayah di Indonesia setiap saatnya, sehingga menimbulkan beberapa masalah yang sangat merugikan Negara. Masalah yang dimaksudkan dari penyebaran wabah Virus Covid 19 tersebut yaitu berupa ancaman terhadap kemanusiaan, sosial dan ekonomi atau keuangan Negara. Seperti apa yang disampaikan dalam berita bahwa “Virus Corona (Covid-19) tidak lagi hanya masalah kesehatan namun telah menjadi ancaman kemanusiaan, sosial dan ekonomi atau keuangan Negara. Ancaman pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 itu, tidak mengenal batas Negara dan telah menimbulkan banyak korban manusia”. (Detiknews.Com. 27 Maret 2020). Maka dari itu semua pemerintah harus bertindak dengan cepat agar ancaman tersebut tidak sampai terjadi berlarut-larut. Seperti apa yang disampaikan dalam berita bahwa bagaimana mendorong pemerintah untuk membangun sistem informasi untuk penanggulangan. Sistem informasi tersebut bernama BLC atau Bersatu Melawan Covid-19”. (TRIBUNNEWS.COM. Jakarta, 24 Juni 2020).

Dalam rangka menjalankan dan menyukseskan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan *physical distancing*, serta kebijakan (PSBB) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara kebijakan program pelayanan publik dibidang penyedia pelayanan jasa tersebut, maka Pemerintah Kota Malang harus dituntut bisa menjalankannya seoptimal mungkin, karena apabila permasalahan tentang wabah Virus Covid-19 tersebut apabila tidak cepat ditindaklanjuti maka akan berdampak di bidang kemanusiaan, sosial, serta ekonomi dan keuangan daerah. Dimana dalam menyelenggarakan

kebijakan sosial dan , serta kebijakan (PSBB) pembatasan berskala besar tersebut maka Pemerintah Kota Malang harus bisa menjalaninya sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat demi untuk mencegah penyebaran wabah Virus Covid-19 dan juga untuk memangkas klaster penyebaran wabah Covid-19 di Kota Malang karena itu semua termasuk dalam Pelayanan Publik yang berbentuk pelayanan dibidang jasa kepada masyarakat yang ada di Kota Malang. Berdasarkan pada masalah di atas, maka peneliti mengambil judul tentang **“PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENANGANAN WABAH COVID 19 BAGI MASYARAKAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Malang dalam Hal Penanganan Wabah Virus Covid 19 Bagi Masyarakat ?
2. Apakah Ada Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemerintah Kota Malang dalam Hal Penanganan Wabah Virus Covid 19 Bagi Masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Kota Malang dalam Hal Penanganan Wabah Virus Covid 19 Bagi Masyarakat

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemerintah Kota Malang dalam Hal Penanganan Wabah Virus Covid 19 Bagi Masyarakat

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tambahan mengenai peran Pemerintah Kota Malang dalam hal penanganan wabah virus covid 19 bagi masyarakat di Kota Malang.
 - b) Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup Administrasi Publik
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pemerintah Kota Malang, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan mengatasi permasalahan yang ada di instansi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Sinambela. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik (Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta : PT.Bumi Aksara..

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung : Alfabeta

Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)

Jurnal

Bima Jati, Gillansg Risky Aji Putra. 2020. *Optimalisasi Upaya Pemerintah
Dalam Mengatasi Pandemic Covid 19 Sebagai Pemenuhan Hak Warga
Negara*. Universitas Islam Negeri Susuna Gunung Jati Bandung,
Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta. Vol.7, No.5

Anung Anadi Pradana, Casman, Nur'aini. 2020. *Pengarus Kebijakan Social
Distancing Pada Wabah Covid 19 Terhadap Kelompok Rentan Di
Indonesia*. Jurusan Ilmu Keperawayan, Stikes Mitra Keluarga. Vol.7, No.6

Darmin Tuwu. 202. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19*. Jurusan
Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip, Universitas Halu Oleo. Vol.3, No.2

Aprista Ristyawati. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai
Amanat UUD NRI Tahun 1945* . Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro.
Vol.3, No2.

Muh. Hasrul. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol.3, No.2.

Mohammad Mulyadi. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Bidang Kesejahteraan Sosial. Vol.12, No.8.

Muhamad Azhar, Hanna Aulia Azzarha. 2020. Government Strategy in Implementing The Good Governance During COVID-19 Pandemic In Indonesia. Administrative Law and Governance Journal Internasional. Vol.3, No.2.